



LAPORAN TRIWULAN-3 TA. 2024

*BALAI
BESAR
PENGUJIAN
STANDAR
INSTRUMEN
PASCAPANEN
PERTANIAN*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Triwulan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian), yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan triwulan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, 21 Oktober 2024

Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Pascapanen Pertanian



Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.
NIP 197102241998031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
I PENDAHULUAN	4
1.1. Tujuan	5
1.2. Sasaran	5
II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. Capaian Kinerja	7
2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	8
III KEGIATAN STRATEGIS	9
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	9
3.1.1. Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan/Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	9
3.1.2. Produk Instrumen Pascapanen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	40
3.1.3. Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang didiseminasikan	40
3.1.4. Lembaga Penerap Standar yang didampingi	41
3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	46
IV KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN	47
4.1. Evaluasi Aplikasi Monev Online	47
4.1.1. Aplikasi SMART DJA	47
4.1.2. Aplikasi e-Monev Bappenas	48
4.1.3. Aplikasi e-Monitoring BSIP	49
4.1.4. Aplikasi e-SAKIP	49
4.1.5. Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)	50
4.2. Evaluasi Kegiatan Manajemen	51
4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM	51
4.2.2. Pengelolaan Aset	51
4.3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	65
V KESIMPULAN DAN PENUTUP	66
5.1. Evaluasi Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya	66
5.2. Kesimpulan	66
5.3. Saran dan Penutup	67

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Pengujian Standarisasi Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) merupakan salah satu Unit Kerja dari BSIP (Badan Standarisasi Instrumen Pertanian), sesuai dengan PERMENTAN 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan Fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; b) Pelaksanaan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; c) Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; d) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2024 BBPSI Pascapanen memiliki beberapa kegiatan strategis mendukung program nilai tambah dan daya saing industri, yaitu:

- 1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, terdiri dari:
 - a. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan target output 4 standar, mencakup: 1) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian); 2) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi); 3) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Susut padi); 4) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng); 5) Lembaga Sertifikasi Produk, Jasa, Proses (LSPro); 6) Pengelolaan Komisi Teknis SNI dan CODEX; dan 7) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian.
 - b. Instrumen mutu pascapanen pertanian yang diuji dengan target output 60 produk
- 2) Dukungan Manajemen Fasilitasi Standarisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari:
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target output 4 layanan, mencakup: 1) Layanan BMN (Pelaksanaan Pengelolaan BMN, Pengelolaan Barang Milik Negara); 2) Layanan Hubungan Masyarakat (Pendampingan Dukungan Penas); 3) Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggaan dan Umum: Manajemen Tata Usaha dan

Kelembagaan Internal dan Layanan Informasi Publik, Layanan Pengelolaan PNBPN: Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium); 4) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, dan Pemeliharaan Kantor; dan Pembayaran Terkait Operasional Kantor).

- b. Layanan Manajemen SDM Internal dengan target output 88 orang, mencakup: Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian).
- c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan target output 3 layanan, mencakup:
 - 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran: Perencanaan Program dan Anggaran, Koordinasi Institusional);
 - 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi);
 - 3) Layanan Manajemen Keuangan (Pengelolaan Keuangan: Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran).

1.1. Tujuan

BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki visi: "Menjadi unit pelaksana teknis yang akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam standarisasi instrumen pascapanen mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki misi: melaksanakan kegiatan standarisasi instrumen pascapanen pertanian mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.

1.2. Sasaran

Dalam mewujudkan visi misinya tersebut, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Standar.
- 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan

berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai).

- 3) Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

II. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024, terdapat 3 IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) yang mendukung pencapaian IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program) BSIP. Berdasarkan Renaksi yang telah disusun di lingkup BSIP, BSIP memiliki sasaran program pertama (SP1) berupa Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP): Persentase penerapan standar instrumen pertanian, terdiri dari: a) Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna, b) Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP. Pada SP1 ini, sesuai PK BBPSI Pascapanen Pertanian yang memiliki sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, maka BBPSI Pascapanen Pertanian hanya berkontribusi pada IKSP kedua, yaitu Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga berkontribusi pada capaian IKSP3 BSIP, yang memiliki SP3 berupa 'Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima' dengan indikator kinerja sasaran kegiatan di BSIP adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Adapun capaian keberhasilan indikator tersebut sampai dengan akhir triwulan ketiga tahun 2024 adalah sebagai berikut: Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 85%, telah dilakukan review oleh Itjen dengan hasil penilaian sebesar 80,30.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP3 BSIP: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP4 BSIP: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan

indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

2.2 Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Adanya pemblokiran anggaran dan *Automatic Adjustment* (AA).
- Terdapat kegiatan yang baru bisa berjalan dikarenakan pembukaan blokir

Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:

- Pemacuan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi ataupun anggaran yang tersedia.
- Diadakan rapat intensif dan penguatan tim untuk berkoordinasi dengan komtek secara lebih intens.
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.

III. KEGIATAN STRATEGIS

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp726.236.793,00 (60,52%) dan capaian fisik sebesar 72%, berikut capaian kinerja dari kegiatan teknis di BSIP Pascapanen Pertanian.

3.1.1. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan/Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

1) Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

a. Penyusunan Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp372.145.901,00 (62,02%) dan capaian fisik sebesar 78,25%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

i) *RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar 60%, dengan perkembangan kegiatan yaitu :

- Penyusunan konsep TOR dan Laporan Tengah Tahun.
- Diskusi ini menghasilkan sistematika penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian secara bersama-sama dilakukan penyusunan kedua laporan tersebut baik oleh pejabat fungsional maupun oleh teknisi laboratorium.
- Finalisasi draf RSNI Daun Rajangan Kering Talas Beneng.
- Kegiatan ini dilakukan dengan pembacaan draf RSNI yang kemudian direview atau dikoreksi oleh anggota tim konseptor BBPSI Pascapanen untuk menghindari adanya kesalahan data atau penulisan.
- Pelaksanaan Kegiatan Rapat Teknis 1.

Rapat Teknis 1 dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus 2024. Dalam ratek 1 membahas batang tubuh yang berupa pasal-pasal draft RSNI. Adapun pasal yang dibahas dan mendapat tanggapan serta perbaikan dari tamu undangan yang hadir baik daring maupun luring mencakup judul, acuan normatif, istilah dan definisi, bahan baku, peralatan, prosedur panen, dan prosedur pascapanen.



Gambar 1. Rapat teknis 1 RSNI Talas Beneng

- Pelaksanaan Kegiatan Rapat Teknis 2

Rapat Teknis 2 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 membahas batang tubuh yang berupa pasal-pasal draft RSNI antara lain prosedur pasca panen, lampiran, dan bibliografi.



Gambar 2. Rapat 2 RSNI Talas Beneng

- Pelaksanaan Kegiatan Rapat Konsensus.

Komite Teknis 65-22 telah melaksanakan Rapat Konsensus untuk RSNI penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng pada 30 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut dibacakan draft akhir RSNI untuk menyamakan persepsi pada setiap kata dan kalimat yang digunakan. Adapun hal-hal yang masih perlu dilakukan penyesuaian antara lain pada bagian judul, daftar isi, prakata, ruang lingkup, istilah dan definisi, peralatan, prosedur pemetikan daun, prosedur pascapanen, dan lampiran.

- Jajak Pendapat

Jajak pendapat RSNI III Daun Rajang Talas Beneng dilaksanakan pada 23 September 2024 hingga 22 Oktober 2024.



Gambar 3. Rapat Konsensus RSNI Talas Beneng

- Kunjungan Lapang terkait RSNI Daun Talas.

Kunjungan lapang dilakukan dengan mengunjungi Rumah Talas Beneng yang merupakan unit usaha dari CV. Talas Jaya Nusantara berlokasi di Kecamatan Pasrujambe Lumajang. Daun talas rajangan yang dihasilkan telah menembus pasar ekspor Australia, Amerika, dan India. Untuk memenuhi kebutuhan ekspornya CV. Talas Jaya Nusantara memiliki mitra petani pemasok yang tersebar di beberapa kecamatan di Lumajang, untuk harga daun rajangan kering yang berlaku sekitar Rp 25.000/Kg.



Gambar 4. Kunjungan Lapang RSNI Talas Beneng

- ii) *RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar 90%, dengan perkembangan kegiatan yaitu:

- Verifikasi penanganan pascapanen bawang merah di Majalengka
Verifikasi dilaksanakan di Kelompok Tani Mandiri Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Pada dasarnya proses penanganan pascapanen bawang merah melalui tahapan panen, pelayuan, sortasi dan grading, serta pengemasan.
- Proses pelayuan, sebagai tahapan kritis pada penanganan pascapanen bawang merah dilakukan dengan menjemur bawang merah di bawah matahari dengan cara dihampar dan tanpa adanya proses pengikatan. Selain itu, proses pelayuan di Majalengka juga dilakukan dengan menyimpan bawang merah pada rak di dalam ruangan yang dilengkapi dengan tungku pemanas (Gambar 5.).



Gambar 5. Proses pelayuan bawang merah di Kab. Majalengka

- Penyusunan RSNI 1
RSNI1 telah disusun melalui diskusi Tim Konseptor. Berdasarkan hasil diskusi, isi RSNI1 meliputi: 1) Penyediaan bahan baku, 2) Pelayuan, 3) Pemotongan daun, 4) Sortasi, 5) Pengkelasan, 6) Pengemasan, dan 7) Rekomendasi. Pada kondisi sinar matahari yang tidak memungkinkan untuk proses pelayuan, dapat menggunakan in-store dryer. In-store dryer adalah fasilitas penanganan pascapanen yang dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu dan kelembaban sehingga proses pelayuan lebih terkendali dan higienis.
- Penyusunan Rekomendasi
Penyusunan rekomendasi telah dimulai dengan melakukan pengambilan sampel bawang merah untuk dianalisis kadar air, ukuran, dan residu pestisida. Sampel yang dianalisis meliputi sampel dari Cirebon dan Majalengka, sampel dari 7 pasar tradisional dan sampel dari 3 pasar modern.

- Dilaksanakan kegiatan Ratek 1
Kegiatan rapat teknis 1 dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024. Pada rapat tersebut disepakati perubahan pada pasal-pasal draft RSNI antara lain pada Judul, Ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, tahapan proses, persyaratan, rekomendasi, dan lampiran.
- Dilaksanakan kegiatan Ratek 2
Kegiatan rapat teknis 2 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 membahas batang tubuh yang berupa pasal-pasal draft RSNI. Hasil ratek ini menyetujui RSNI 1 menjadi RSNI 2.
- Telah dihasilkannya RSNI 3 melalui Rapat Teknis 2 dan Rapat Konsensus. Pada tanggal 12 September 2024. Pada Ratek 2, substansi utama yang perlu didiskusikan Tim Konseptor adalah penggunaan SNI 3159 2013 Bawang Merah sebagai acuan normative. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dan disepakati terutama terkait adanya penjelasan dalam SNI tersebut bahwa Panjang batang daun yang dipotong dari leher umbi minimal 2 cm, sedangkan berdasarkan informasi dari pelaku usaha seharusnya maksimal 2 cm. Berdasarkan ASEAN Stan 14 2009 juga menjelaskan bahwa pemotongan batang semu dilakukan maksimal 2 cm dari leher umbi. Disepakati pada rapat konsensus bahwa pemotongan panjang batang dari leher umbi maksimal 2 cm. Selain itu disepakati pula bahwa SNI 3159 2013 Bawang Merah tetap menjadi acuan normatif.



Gambar 6. Panjang batang dari leher umbi bawang

- Jajak Pendapat
Jajak Pendapat RSNI III bawang Merah Konsumsi akan dilakukan pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2024

iii) *RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar 75%, dengan perkembangan kegiatan yaitu:

- Rapat internal untuk melanjutkan penyusunan draft RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi.
- Melengkapi draft RSNI pada bagian unsur-unsur yang perlu ada dalam RSNI serta memperbaiki format RSNI sesuai dengan Pedoman penulisan SNI yang diterbitkan oleh BSN.



Gambar 7. Rapat Internal penyusunan draft RSNI 1

- Rapat internal untuk melanjutkan penyusunan draft RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi serta diskusi rencana kegiatan bulan Agustus. Mendiskusikan rencana pengambilan data pada tahap pengeringan dengan menggunakan dryer, rencana pra rapat dengan tim konseptor, rencana koordinasi dengan BPS dan BSN.



Gambar 8. Rapat Internal penyusunan draft RSNI 1

- Rapat teknis Komtek 65-22 dalam rangka Pembahasan RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi.

Rapat ini dilakukan untuk membahas draft RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi dengan para narasumber, tim komtek dan konseptor.



Gambar 9. Rapat Teknis Komtek 65-22

- Rapat konseptor untuk melanjutkan penyusunan draft RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengembangan Metodologi dan Sensus-BPS RI, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan- BPS RI, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna-BRIN, BBPSI Mekanisasi Pertanian dilakukan dalam rangka diskusi, menyamakan persepsi, menghimpun saran dan masukan dari para narasumber untuk penyempurnaan RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi pada semua bagian dalam RSNI.



Gambar 10. Rapat konseptor RSNI metode pengukuran susut pascapanen

- Rapat dan diskusi dengan stakeholders (BB Padi dan Perpadi)

Diskusi RSNI metode pengukuran susut padi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait metode pengukuran susut pascapanen padi.



Gambar 11. Diskusi metode pengukuran susut pascapanen padi dengan BBPSI Padi dan Perpadi

- Rapat dan diskusi metode pengukuran susut pascapanen padi dengan stakeholders (Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Karawang, Penggilingan Padi, UPTD).

Diskusi RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi dengan beberapa stakeholders untuk mendapatkan saran, masukan serta keadaan aktual di lapangan terkait susut pascapanen padi.



Gambar 12. Diskusi metode pengukuran susut pascapanen padi dengan BBPSI Padi dan Perpadi

- Rapat Teknis 2 dan Rapat Konsensus

Rapat teknis dan sekaligus rapat konsensus kegiatan padi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024. Rapat konsensus menyetujui beberapa perubahan diantaranya: menambahkan nama latin beras; pengeringan, “kadar air sampai batas aman” penggunaan kata aman terlalu ambigu. Istilah batas aman pada kadar air pada padi sudah baku. Batas aman kadar air gabah sebelum disimpan adalah 14%, jika gabah terlalu kering disimpan di ruangan lembab maka akan menyerap air, sedangkan jika kadar air tinggi yang disimpan di ruangan kering, maka kadar airnya akan turun; pemanenan dibagi menjadi 2 tipe, tipe manual dan kombinasi, manual artinya pemanenan saja, jika kombinasi terdiri pemanenan sekaligus perontokan. Menurut definisi yg disesuaikan dgn SNI 8185 teralu spesifik mengenai mesin, sehingga cukup disederhanakan definisinya sesuai kebutuhan dokumen RSNI ini, yaitu “mesin yang digerakan oleh motor penggerak yang dapat melakukan beberapa kegiatan dalam satu rangkaian proses, meliputi memotong, merontok, membersihkan, dan mengantongi gabah”.

iv) *Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar 70%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan perhitungan paparan pestisida untuk 292 bahan aktif yang terdiri dari 7197 komoditas. Dari total 292 bahan aktif yang sudah diselesaikan perhitungan nilai ADI-nya, diantaranya terdapat 46 bahan aktif dengan nilai ADI lebih dari 100%, 2 bahan aktif yang sama dengan 100%, dan 244 bahan aktif di bawah 100%.
- Tim BSIP Lingtan dan BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan pertemuan untuk menindaklanjuti hasil perhitungan ADI pada tanggal 15 Juli 2024. Dari pertemuan tersebut disepakati terkait penugasan, Tim Lingtan akan dropping komoditas dan perhitungan ulang 46 bahan aktif. Sedangkan Tim Pascapanen akan menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia draft yang telah diselesaikan oleh Tim Lingtan.
- Tim Konseptor BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan pertemuan untuk memfinalkan draft RSNI1 pada tanggal 17 Juli 2024.

Pembahasan draft Revisi SNI BMR Pestisida 7313:2008 tahap 1 ini dilakukan mulai dari kerangka awal dan akhir yaitu mulai dari prakata sampai dengan informasi pendukung terkait perumus standar. Untuk pembahasan draft isi/batang tubuh dari RSNI dilanjutkan di tahap 2.

- Melakukan pertemuan untuk mengalihbahasakan seluruh komoditas yang ada dalam draft dengan total komoditas 6800 komoditas pada tanggal 22 dan 29 Juli 2024.



Gambar 13. Pertemuan Finalisasi Draft RSNI

- Melaksanakan identifikasi bahan aktif residu pestisida dan mengambil sampel pada komoditas gabah, beras, sawi, kol, cabai dan tomat di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur. Komoditas yang telah disampling ini kemudian dianalisa kandungan residu pestisidanya di Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Kementerian Perdagangan. Selain informasi dari petani, dalam menentukan bahan aktif yang akan diujikan pada komoditas tersebut dilakukan juga diskusi dengan Laboratorium BPMB, Kementerian Perdagangan.



Gambar 14. Pengambilan sampel

- Telah dilaksanakan Rapat Teknis 1

RSNI BMR Pestisida pada hasil pertanian telah melalui tahapan rapat teknis 1 yang dilaksanakan tanggal 6-7 Agustus 2024 di Avenzel Hotel Cibubur. Rapat teknis tersebut dihadiri oleh anggota komtek 65-22, perwakilan BSN, konseptor serta tim ahli. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa perubahan pada draft RSNI BMR Pestisida pada hasil pertanian, diantaranya adalah pada judul, ruang lingkup, penambahan acuan normatif, istilah dan definisi, cara pengujian dan bibliografi.

Hasil rapat I sudah dilakukan perubahan dan perbaikan dimana saran dari Komtek dilakukan harmonisasi dengan draft Perka Bapanas. Draft sedang dalam proses harmonisasi dan terdapat beberapa perbedaan karena acuan yang digunakan selain standar Codex, standar Australia dan standar ASEAN.



Gambar 15. Pertemuan Finalisasi Draft RSNI

- Rapat Teknis 2

RSNI BMR Pestisida pada hasil pertanian telah melalui tahapan rapat teknis 2 yang dilaksanakan tanggal 13 September 2024 di Aula BBPSI Pascapanen Pertanian. Rapat teknis tersebut dihadiri oleh anggota komtek 65-22, perwakilan BSN, konseptor dan tim ahli. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa perubahan pada draft RSNI BMR Pestisida pada hasil pertanian, diantaranya adalah pada judul, ruang lingkup, penambahan acuan normatif, istilah dan definisi, cara pengujian dan bibliografi. Pada rapat tersebut disepakati bahwa RSNI BMR pestisida akan mengeliminasi 187 nilai BMR yang berbeda dengan Perka BAPANAS. BSN telah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan Rapat Konsensus setelah perbaikan draft.

- Rapat Konsensus

Rapat konsensus telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024. Pada rapat konsensus ini disepakati beberapa hal diantaranya : Metode EN 15662 merupakan metode acuan yang digunakan jika terjadi perbedaan hasil pengujian sehingga metode EN 15662 dituliskan terlebih dahulu.

v) *Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanian* realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp 135.015.700,00 (54,01%) dan realisasi fisik sekitar 75%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Diskusi internal kegiatan LSPro

Dengan telah dibukanya blokir anggaran kegiatan LSPro, maka terjadi perubahan dalam realisasi keuangan, sehingga diperlukan strategi percepatan realisasi keuangan. Pada akhir tahun direncanakan akan dilakukan pendaftaran akreditasi LSPro, namun masih menunggu ketersediaan pelaku usaha sertifikasi. Penjajakan ke pelaku usaha beras dan gula akan dilakukan di pelaku usaha di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Adapun progres pendampingan dokumen RMU Pamijahan, saat ini sudah dibuatkan master dokumen mutu, namun pelaku usaha perlu menambahkan dokumen pendukung lainnya. Terkait dengan Skema Pelatihan RMU Pamijahan adalah dengan melibatkan BSI dan narasumber dari personel Karawang. Terkait dengan Skema sertifikasi perlu dilakukan pengembangan skema sesuai Ruang lingkup (RL) Sertifikasi yang akan diajukan. LSPro BBPSI Pascapanen Pertanian akan mengajukan 2 RL sertifikasi yaitu 12.02 Hasil Pertanian dan perkebunan (biji kopi, beras) dan RL 15.03 (gula, produk gula, dan pati). Untuk penyusunan dokumen LSPro memerlukan finishing menuju akreditasi. Progres berdasarkan catatan sebelumnya yang masih belum ada struktur dan SK (menunggu program KUD). Terkait dengan telah beroperasinya LPH BBPSI Pascapanen perlu dibuatkan materi promosi dalam bentuk leaflet maupun flyer online. Perlu juga dilakukan pengadaan bahan habis pakai untuk kebutuhan audit halal maupun pengambilan sampel uji/contoh uji halal, standar, dll.



Gambar 16. Diskusi Internal kegiatan LS Pro

- Diskusi dan koordinasi dengan Pelaku Usaha

Diskusi dengan pelaku usaha dilakukan oleh tim dokumen yang mendampingi pelaku usaha calon mitra sertifikasi. Tim dokumen membimbing penyusunan kelengkapan dokumen bagi pelaku usaha (RMU Purbaya Tani Mandiri). Proses alur produksi di kelompok tani sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumennya, antara lain dokumen Penerapan GMP terhadap keseluruhan kegiatan produksi; Penerapan SOP produksi sudah ada namun perlu dituliskan dalam bentuk dokumen.



Gambar 17. Diskusi dengan pelaku usaha

- Pelaksanaan Sidang Komisi Fatwa Pelaku Usaha LPH

LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan pemeriksaan halal ke 3 pelaku usaha jasa penyembelihan, yaitu ke Rumah Porong Unggas (RPU) CV Fadilah di Ciseeng Kabupaten; CV Sukro Group di Bekasi; dan PT Mustapa Jaya Mandiri di Bojong Gede Kabupaten Bogor. Adapun satu pelaku usaha yaitu CV Fadilah telah keluar sertifikat Halal nya (SH), sedangkan CV Sukro Group dan PT Mustapa Jaya Mandiri dalam proses penerbitan SH oleh BPJPH.

- Pelatihan ddPCR untuk Autentikasi Halal Produk Berbasis Gelatin

Pelatihan diikuti oleh analis/teknisi Litkayasa, yang dilakukan di Halal Center IPB University. Pelatihan dilakukan selama 2 hari, untuk memberikan pembekalan kepada peserta dalam melakukan analisis deteksi kehalalan produk gelatin. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan analis laboratorium mengenai penggunaan alat Droplet Digital PCR (ddPCR) untuk Autentikasi Halal Produk Berbasis Gelatin.



Gambar 18. Pelatihan ddPCR untuk Autentikasi Halal Produk Berbasis Gelatin

- Kaji Ulang Dokumen LPH

Kegiatan Kaji ulang dokumen (KUD) dilakukan secara bersamaan dengan seluruh dokumen mutu yang ada pada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) BBPSI Pascapanen Pertanian. Kegiatan kaji ulang dokumen dilakukan untuk dokumen integrasi dan dokumen mutu LPH. Pelaksanaan KUD dilakukan selama 3 minggu (hingga akhir Juli) dan hasil KUD tersebut menjadi bahan perbaikan untuk dokumen mutu secara keseluruhan.

- Pelatihan penentuan titik kritis halal pada produk pangan

Kegiatan ini dilakukan untuk membekali personel LPH dalam operasionalisasi dan pelaksanaan audit pemeriksaan halal LPH BBPSI Pascapanen Pertanian. Pelatihan ini diikuti oleh auditor halal, SDM Syariah, PPC, adm, serta personel BBPSI Pascapanen Pertanian terkait. Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari IHATEC yang meliputi pengetahuan bahan halal dan haram, titik kritis halal, proses produk halal, dan studi kasus.



Gambar 19. Pelatihan penentuan titik kritis halal pada produk pangan

- Pendampingan pelaku usaha untuk penyiapan dokumen sertifikasi

Salah satu klien yang memiliki potensi untuk disertifikasi sesuai ruang lingkup LSPro antara lain adalah Rice Milling Unit. Di Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor terdapat RMU Kelompok Purbaya Tani Mandiri yang merupakan binaan dari BSI Maslahat dan tertarik untuk memperoleh sertifikasi untuk produk beras yang menjadi bisnis utamanya. RMU Kelompok Purbaya Tani Mandiri sudah melakukan proses bisnisnya dan melakukan pendokumentasian proses bisnisnya, hanya saja masih memerlukan pendampingan untuk melengkapi dokumen sertifikasi. Pendampingan penyusunan dokumen berpotensi menyalahi azas ketidakberpihakan LSPro, agar azas ini dapat tetap terlaksanakan, tim yang melakukan proses pendampingan penyusunan dokumen sertifikasi berbeda dengan tim yang akan melakukan audit. Pendampingan penyusunan dokumen dilakukan oleh 4 orang personel. Kerangka dokumen yang disiapkan antara lain mencakup legalitas lembaga, organisasi, personel, komunikasi personel, bahan baku, dan produksi. Hasil dokumen yang telah, disusun bersama diserahkan dan disimpan di RMU Kelompok Purbaya Tani Mandiri, diharapkan dokumen tersebut menjadi bekal bagi proses sertifikasi beras yang dihasilkan oleh RMU Kelompok Purbaya Tani Mandiri.



Gambar 20. Pendampingan pelaku usaha untuk penyiapan dokumen sertifikasi

- Koordinasi dan peninjauan dengan calon pelaku usaha untuk sertifikasi
Koordinasi dan peninjauan calon pelaku usaha sertifikasi bertujuan untuk menjaring calon klien untuk dilakukan sertifikasi produk gula palma terhadap PT. Naramos yang beralamat di Kampung Tunggilis, RT 01, RW 01, Desa Ciputri Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan Lokasi, sarana prasarana dan fasilitas bersama pemilik Perusahaan Pak Irpan diperoleh hasil bahwa PT. Naramos memiliki potensi untuk dilakukan sertifikasi. Berdasarkan hasil peninjauan tim LS Pro, PT Naramos memiliki peralatan yang lengkap dalam satu line proses untuk produksi gula semut. Selanjutnya PT Naramos diberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen mutu berupa panduan mutu yang memuat antara lain komunikasi Lembaga, personel, kompetensi kemampuan tugas dan wewenang personel, prosedur rekrutmen personel, prosedur peningkatn kemampuan personel, fasilitas, prosedur pemeliharaan, pemantauan fasilitas, peralatan, pengoperasian, pemeliharaan, mitra pihak eksternal, bahan baku, proses produksi dan lampiran terkait formulir. Selain itu juga diambil sampel untuk dilakukan pengujian terhadap parameter yang dipersyaratkan sesuai yang terdapat pada skema dan SNI syarat mutu gula palma.



Gambar 21. Koordinasi dan peninjauan dengan calon pelaku usaha sertifikasi

- Koordinasi dan sosialisasi LPH dengan Dinas KUKM Daging Kota Bogor
Koordinasi dan sosialisasi ke Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KUKM Daging) dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan layanan LPH BBPSI Pascapanen dan peninjauan kerjasama sertifikasi halal. Perwakilan dari tim LPH BBPSI Pascapanen diterima di Dinas KUKM Daging oleh Kepala Bidang Perindustrian, Bapak Ferry Firmansyah, ST, MA. Kabid

Perindustrian menyampaikan bahwa di Dinas KUKM Daging secara kinerjanya tidak ada target untuk sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Selama ini hanya ada sosialisasi halal yang disampaikan kepada IKM melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas. Untuk IKM itu sendiri, sertifikasi halal yang dilakukan adalah sertifikasi halal selfdeclare per wilayah kecamatan yang didampingi oleh PPH dibawah koordinasi Kemenag. Di Kota Bogor, sudah terdapat 1900 UKM yang sudah mengajukan selfdeclare untuk sertifikasi halal dan 394 UKM yang mengajukan sertifikasi halal secara mandiri. Pada kesempatan ini, tim LPH BBPSI Pascapanen juga menyampaikan kerjasama yang dapat disinergikan dengan Dinas UKM Daging dan diharapkan kedepannya dapat disosialisasikan ke IKM yang menjadi mitra Dinas KUKM Daging Kota Bogor.



Gambar 22. Koordinasi dan sosialisasi LPH dengan Dinas Koperndag Kota Bogor

- Pelatihan pemahaman ISO 17065:2012

Kegiatan pelatihan pemahaman ISO 17065:2012 bertujuan untuk membekali personellPK BBPSI Pascapanen khususnya personel LSPro yang belum mengikuti pelatihan ISO 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian-Lembaga Sertifikasi proses, jasa dan Produk (LSPro). Selain itu pelatihan ini juga untuk menyegarkan kembali bagi personel yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan tersebut. Narasumber pelatihan berasal dari Pusbang SDM BSN dengan materi yang disampaikan Terkait persyaratan manajemen, persyaratan organisasi dll.



Gambar 23. Pelatihan Pemahaman ISO 17065:2012

- Sosialisasi dan promosi LPH

Kegiatan sosialisasi dan promosi LPH BBPSI Pascapanen dilakukan baik melalui media cetak maupun media online lainnya dengan tujuan untuk mengenalkan LPH BBPSI Pascapanen ke masyarakat dan pelaku usaha lainnya, serta membantu masyarakat dalam rangka sertifikasi halal untuk ruang lingkup audit/pemeriksaan halal pada makanan dan minuman, produk kimiawi, dan jasa penyembelihan. Salah satu media promosi yang telah dilakukan melalui leaflet yang disebarakan melalui aplikasi media online, baik whats App, Instagram, facebook, dll. Harapannya dengan sosialisasi dan promosi ini pelaku usaha dan pengguna mempunyai pilihan dan dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan halal yang ditawarkan oleh LPH BBPSI Pascapanen.

- Pelatihan Mutu Beras Berdasarkan SNI 6128:2022

Pendampingan penigkatan mutu beras dilakukan oleh 3 orang personel beserta narasumber dari Lab Mutu Beras Karawang sebanyak 3 orang. Materi yang disampaikan antara lain: Pengujian Mutu Beras Berdasarkan SNI 6128:2020 dan Penanganan Pascapanen Padi.



Gambar 24. Pelatihan mutu beras berdasarkan SNI 6128:2022

- Koordinasi dan peninjauan dengan calon pelaku usaha untuk sertifikasi
- Kunjungan dalam rangka peninjauan calon klien di Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara diterima oleh Bapak Sarnata yang merupakan salah satu owner dengan merk ARENTA. Pelaku usaha ini beralamat di Kampung Ciluluk RT/RW 004/007, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil peninjauan tim LS Pro, Arenta memiliki peralatan yang lengkap namun belum diatur dalam satu line proses. Selanjutnya Arenta akan diberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen mutu berupa panduan mutu yang memuat hal hal antara lain adalah: komunikasi Lembaga, personel, kompetensi kemampuan tugas dan wewenang personel, prosedur rekrutmen personel, prosedur peningkatan kemampuan personel, fasilitas, prosedur pemeliharaan, pemantauan fasilitas, peralatan, pengoperasian, pemeliharaan, mitra pihak eksternal, bahan baku, proses produksi dan lampiran terkait formulir. Selain itu juga diambil sampel untuk dilakukan pengujian terhadap parameter yang dipersyaratkan sesuai yang terdapat pada skema dan SNI syarat mutu gula palma. SNI 3743-2021



Gambar 25. kunjungan dan peninjauan sertifikasi gula semut di Arenta

- Penyusunan kelengkapan dokumen dan skema sertifikasi LSPro

Tim LS Pro berada di dua lokasi yakni di kantor BBPSI Bogor dan BBPSI Karawang. Dalam penyusunan dokumen perlu dilakukan secara intens mengingat persyaratan dokumen dari KAN sangat banyak dan beragam yang mencakup dokumen utama, dokumen khusus teknis dan dokumen lainnya, sehingga perlu pembagian tugas dalam penyelesaiannya oleh tim LS Pro.



Gambar 26. Dokumentasi penyusunan persyaratan akreditasi LSPro

- Pelatihan Pemantapan dan teknik Audit dan PPC bidang Pertanian

Pelatihan dilakukan dalam rangka untuk memberikan penyegaran bagi calon auditor dan calon PPC personel LSPro. Narasumber pelatihan ini adalah Bpk Solechan, Lead auditor pada PT AGS dan konsultan PT JTM. Pelatihan menggunakan acuan yang digunakan yaitu Guidelines For Auditing Management Systems (ISO 19011:2018, IDT) yang ada dengan versi Bahasa Indonesia dalam SNI ISO 19011:2018. Sistem mutu yang digunakan untuk audit, antara lain: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, dan ISO 37001. Dasar pengambilan contoh adalah sebagai berikut: Menginventarisir jenis produk dan menetapkan besaran resiko pada produk berdasarkan tujuan pengambilan contoh, Menetapkan unit contoh produk berdasarkan sifat lot dan tujuan pengambilan contoh, Menetapkan metode pengambilan contoh berdasarkan kondisi lot produk, Menyusun rencana pengambilan contoh berdasarkan spesifikasi produk dan tujuan pengambilan contoh secara cermat, teliti dan cepat.



Gambar 27. Pelatihan pemantapan dan teknik audit dan PPC bidang pertanian

- Sosialisasi Layanan Sertifikasi Halal

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengadakan sosialisasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada tanggal 4 September 2024. Peserta sosialisasi berasal dari berbagai elemen diantaranya instansi pemerintah, akademisi, industri dan UMKM yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 28. Sosialisasi layanan sertifikasi halal

- Promosi LPH LSPro pada Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024
Partisipasi BSIP Pascapanen Pertanian pada Bunex 2024 bertujuan untuk mempromosikan layanan yang dimiliki yaitu sertifikasi halal (LPH) dan sertifikasi produk dan jasa (LSPro) kepada pengunjung maupun kepada peserta BUNEX lainnya. Promosi LPH/LSPro dilakukan dengan membuka konsultasi kepada pengunjung terkait ruang lingkup pengujian, prosedur pengajuan sertifikasi maupun biaya sertifikasi, serta membagikan leaflet dan souvenir LPH/LSPro.
- Pra audit LSPro
Kegiatan pra audit dilakukan selama 2 hari, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara dokumen mutu LSPro (ISO integrasi) dengan ISO 17065:2012 tentang Lembaga Sertifikasi produk jasa dan proses. Kegiatan ini mengundang narasumber dari Direktorat Pembinaan dan Pengembangan SPK BSN. Hasil pra audit diperoleh banyak masukan Terkait kesiapan LSPro dalam rangka persiapan kegiatan sertifikasi dan persiapan proses pendaftaran akreditasi LSPro.

vi) *Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codex*

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp32.061.000,00 (64,12%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Seminar Hasil Sidang Committee on Pesticide Residues (CCPR) ke 55. Seminar dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi tindak lanjut hasil sidang CCPR ke 55 yang telah dilaksanakan di Chengdu China pada tanggal 3 - 8 Juni 2024. BBPSI Pascapanen Pertanian telah melaksanakan sebanyak 2 kali rapat penyusunan posisi Indonesia, dan tim sekretariat CCPR telah menyampaikan tanggapan 2 CL (*Circular Letter*). Adapun tindaklanjut dari Seminar Hasil Sidang CCPR ke 55 sebagai berikut:
 1. Perlu dilakukan kajian ilmiah terkait residu pestisida
 2. Perlu FGD terkait residu pestisida dengan stakeholder terkait
 3. Perlu data dukung dari stakeholder terkait tentang data dukung penggunaan bahan aktif tersebut
 4. Perlu institusi yang menangani residu pestisida sehingga penanganannya dapat lebih concern serta dapat memiliki database residu pestisida di Indonesia
 5. Perlu dilakukan revisi Permentan 53 untuk penetapan MRL yang terbaru

6. Diharapkan dapat mencermati bahan aktif yang akan dibahas di tahun 2025
7. Diharapkan data dukung terkait residu pestisida yang dibahas JMPR untuk dibahas dipertemuan tahun 2025
8. Saran KLN, perlu melakukan kajian-kajian untuk menghasilkan rekomendasi untuk bisa disampaikan kepada pimpinan sehingga dapat ditunjuk Lembaga yang akan bertanggung jawab penuh.



Gambar 29. Seminar hasil sidang CCPR

- Laporan Tindak Lanjut Sidang Codex Committee on Contaminant in Food ke-17 (CCCF17).

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti Pada Sidang CCCF17, diantaranya:

1. Indonesia perlu menyiapkan data paparan cemaran EtO dan 2-CE. BBPSI Pascapanen Pertanian diminta berpartisipasi dalam kegiatan surveillance dan pengujian cemaran tersebut bersama dengan Bapanas, BRIN dan Badan POM.
 2. Indonesia perlu menyiapkan data cemaran timbal pada dried bark dan kombinasi rempah lainnya serta data cemaran aflatoksin total pada kacang olahan. Seluruh Kementerian/ lembaga diminta dapat berpartisipasi menyiapkan data tersebut.
 3. Informasi lainnya bahwa Sidang CCCF18 akan dilaksanakan di Thailand pada 23- 27 Juni 2025.
- Audiensi terkait residu pestisida

Dalam rangka menindaklanjuti bahan aktif priority list CCPR tahun 2024 dan 2025 maka tim sekretariat codex mengunjungi Croplife untuk mengidentifikasi bahan aktif dalam priority list yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang tergabung dalam Croplife. Diskusi dipimpin oleh Ketua Sekretariat Codex BBPSI Pascapanen, Muhammad Hanafi dan dihadiri oleh anggota Tim Sekretariat Codex

BBPSI Paspcanen dan beberapa perwakilan dari Croplife (Sygenta, BASF, FMC, Corteva). Diskusi bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran wilayah petani pengguna bahan aktif yang ada dalam *priority list*.



Gambar 30. Audiensi terkait residu pestisida

- Pengujian Sampel Residu Pestisida

Dalam rangka penyusunan data dukung residu pestisida untuk sidang Codex, tim telah melakukan sampling untuk beberapa komoditas yaitu, padi, tomat, kailan, daun bawang dan paprika. Komoditas yang telah disampling ini kemudian dianalisis kandungan residu pestisidanya di Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Kementerian Perdagangan. Bahan aktif yang diujikan pada kelima komoditas pertanian tersebut adalah bahan aktif yang digunakan para petani, dimana informasi bahan aktif yang digunakan diketahui melalui wawancara saat sampling dilakukan. Dari hasil diskusi dan berdasarkan data bahan aktif yang digunakan petani, bahan aktif yang akan diujikan pada Laboratorium BPMB adalah:

1. Tomat, LC: Fipronil, Metalxyl, Azoxystrobin, Acephate, Klorotalonil
2. Daun Bawang, LC: Thiometoxame, Azoxystrobin, Metalaxyl, Tebuconazole, Cyazofamid
3. Padi, LC: Fipronil, Chlorantranilipole, Thiometoxam, Azoxystrobin, Acephate
4. Paprika, LC: Metalaxyl, Azoxystrobin, Dimetoate, Metamidofos, Fipronil
5. Kailan, LC: Azoxystrobin, Metalaxyl, Tebufenozid, Thiometoxam, Chlorantranilipole.



Gambar 31. Pengujian Sampel Pestisida

- Survei residu pestisida untuk data dukung Codex - Banten

Tujuan dari pelaksanaan survei adalah untuk melakukan identifikasi residu pestisida pada komoditas pertanian untuk data dukung Codex. Komoditas untuk pengujian residu pestisida adalah:

1. Cabe Keriting

Bahan aktif: Mancozeb, Siantraniliprol, Iufenuron, dan Karbosulfan

2. Terong

Bahan aktif: Tembaga Oksida, Pymetrozyn, Piamethoxam, Lamda Cyhalothrin, Cyntranliprole, Propineb, dan Mancozeb

3. Jagung

Bahan aktif: Dimetomorf, Mancozeb, dan Isosikloseram

4. Kacang Panjang

Bahan aktif: Karbofuran, Siantraniliprol, dan Iufenuron.



Gambar 1. Audiensi terkait residu pestisida

- Survei Residu Pestisida untuk Data Dukung Codex - Cianjur

Tujuan pelaksanaan survei adalah: Melakukan identifikasi residu pestisida pada komoditas pertanian untuk data dukung Codex. Komoditas untuk pengujian residu pestisida adalah:

1. Cabe Rawit

Bahan aktif: Profenofos 500g/l, Klorantraniliprol 100 g/l, Tiametoksam 200 g/l., Azoksistrobin 200 g/l, Difenokonazol 125 g/l.

2. Mentimun

Bahan aktif: Lambda cyhalothrin: 106 gr/l, Thiamethoxam: 141 gr/l. , Profenofos 500 g/l, Klorantraniliprol 100 gram/liter, Tiametoksam 200 gram/liter.

3. Padi

Bahan aktif: Fipronil 50 g/l., Propineb



Gambar 2. Survei Residu Pestisida untuk Data Dukung Codex - Cianjur

- Pengujian Sampel Residu Pestisida

Tim telah melakukan sampling untuk beberapa komoditas yaitu, padi, tomat, kailan, daun bawang dan paprika. Komoditas yang telah disampling ini kemudian dianalisa kandungan residu pestisidanya di Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Kementerian Perdagangan. Bahan aktif yang diujikan pada kelima komoditas pertanian tersebut adalah bahan aktif yang digunakan para petani, dimana informasi bahan aktif yang digunakan diketahui melalui wawancara saat sampling dilakukan. Bahan aktif informasi dari petani tersebut kemudian didiskusikan juga dengan Laboratorium BPMB apakah bisa dilakukan dalam pengujian untuk

beberapa bahan aktif dalam satu komoditas. Dari hasil diskusi untuk satu komoditas dapat dilakukan pengujian untuk 1-5 bahan aktif jika teridentifikasi menggunakan satu instrumen yang sama.

Dari hasil diskusi dan berdasarkan data bahan aktif yang digunakan petani, bahan aktif yang akan diujikan pada Laboratorium BPMB adalah:

1. Mentimum: GC: Chlorpyripos, Bifentrin, Diazionon, Metalaxyl dan Malathion
2. Cabe rawit: LC: Difeconazole, Chlorpyripos, Azoxystrobin, Thiometoxame dan Chlorantranilipole
3. Cabe keriting: LC: Lufenuron, Chlorantranilipole, Azoxystrobin, Chlorpyripos dan Difeconazole
4. Terung: LC: Pymetrozine, Azoxystrobin, Imidacloprid, Pyraclostrobine dan Chlorpyripos-Methyl
5. Gabah: LC: Fipronil, Difeconazole, Picoxystrobine, Tebuconazole dan Propanil



Gambar 3. Pengujian sampel pestisida

vii) *Identifikasi, Analisis dan Kajian Pemberlakuan SNI Wajib* realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp170.979.182,00 (68,39%) dan realisasi fisik sekitar 68%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Identifikasi Penerapan SNI Metode Pengukuran Losses Padi di Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan identifikasi penerapan SNI Metode pengukuran losses padi dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapang ke beberapa kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini

diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas padi di Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar sendiri merupakan lumbung beras di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2023 produksi beras di Kabupaten Sulawesi Barat mencapai 95.976 ton beras dari total 167.392 ton beras atau sekitar 57,33% dari seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat koordinasi, hal yang dibahas yaitu pemaparan pengenalan dan penerapan SNI beras (SNI 6128:2020) dan manajemen penggilingan padi dalam meningkatkan kualitas produk beras. Dalam SNI beras terdapat klasifikasi beras serta syarat mutu umum dan khusus yang harus dipenuhi. Kabupaten Polewali Mandar memiliki 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan tersebut, rata rata terdapat lahan persawahan baik tadah hujan maupun irigasi teknis. Hanya Kecamatan Balanipa saja yang tidak terdapat lahan persawahan.

Selanjutnya dilakukan kunjungan lapang ke beberapa lahan persawahan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Lahan-lahan yang dikunjungi antara lain Kecamatan Luyo, Matakali, Bullo, Mapilli, Binuang dan Tapango. Dari kunjungan lapang ini didapati kendala yang rata-rata dihadapi petani yaitu terbatasnya alat dan mesin pertanian. Rata-rata petani masih menggunakan alat bantu manual seperti sabit untuk panen. Traktor untuk mengolah tanah pun masih terbatas sehingga membuat penanaman menjadi terhambat.



Gambar 35. Rapat Koordiansi Kabupaten Polewali Mandar



Gambar 4. Kunjungan lapang Kabupaten Polewali Mandar

2) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 masih Rp16.035.010,00 (32,07%) dikarenakan baru buka pemblokiran anggaran dan realisasi fisik sekitar 57%, dengan perkembangan kegiatan PNPS yaitu:

- Telah mendapatkan literatur/data mengenai draft usulan Perbapanas tentang batas maksimum cemaran logam berat, BMC mikroba dan BMC Mikortoksin produk pangan segar (buah, sayuran, rempah, penyegar, kacang-kacangan) di peredaran. Konsep ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan harmonisasi penyusunan RSNI BMC Mikroba. Setelah mendapat penjelasan RL KomtekKesmavet, usulan calon PNPS 2025 bidang peternakan dibatalkan karena merupakan RL KomtekKesmavet. Dari 9 usulan calon PNPS 2025 tersisa 7 judul yang diambil 2 topik dari setiap komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) dan 1 judul tentang batas maksimum cemaran mikroba, yaitu:

- (1) tanaman pangan (i) deteksi infestasi kutu beras; (ii) proses berasan jagung;
- (2) hortikultura: (i) penanganan krisan; (ii) proses pengeringan cabe;
- (3) perkebunan: (i) penanganan pala; (ii) proses pascapanen lada
- (4) mikroba: batas cemaran Mikroba Hasil Pertanian Siap Edar.



Gambar 37. FGD kegiatan penyusunan PNPS pascapanen pertanian tahun 2024 pada tanggal 9 Juli 2024

- Kegiatan 2 belum dilaksanakan karena masih menunggu hasil pengisian form nilai kepentingan usulan PNPS 2025 oleh Komtek Pascapanen Pertanian.
- Pada tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan evaluasi terhadap laporan tengah tahun kegiatan Penyusunan PNPS 2025. Sejumlah saran telah disampaikan oleh evaluator, antara lain konsistensi penyebutan PNPS 2025 dan elaborasi usulan PNPS dari calon kegiatan ICARE.
- Ketujuh usulan PNPS 2025 disaring lagi menjadi 4-5 judul, untuk itu Kepala BBPSI Pascapanen memerlukan saran/input dari Komtek Pascapanen Pertanian untuk menyesuaikan dengan ruang lingkupnya. Saran dari Komtek pascapanen ditempuh melalui pengisian matriks nilai kepentingan setiap usulan yang dipertimbangkan berdasarkan: (i) mendukung program pemerintah (pemenuhan gizi, ekspor/perdagangan); (ii) komoditas prioritas/strategis (swsembada; nilai ekonomi petani; (iii) perkembangan iptek; (iv) jika ada, revisi karena sudah tahun lama. Permintaan input dari Komtek Pascapanen Pertanian diajukan pada Ratek 20 Agustus 2024. Saat ini masih menunggu hasil pengisian form oleh anggota Komtek Pascapanen Pertanian.



Gambar 38. Permintaan pengisian form nilai kepentingan usulan calon PNPS kepada Komtek 65-22

- Mengumpulkan informasi mengenai peraturan pemerintah dan kebijakan batas cemaran mikroba pada produk pangan dan pertanian.
- Audiensi dengan swasta calon penerap SNI (dari topik usulan PNPS yang akan diajukan) untuk memperoleh kesediaan menerapkan standar.

Kegiatan audiensi belum dapat dilaksanakan, masih menunggu respon dan arahan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian atas rekap matriks nilai kepentingan oleh Komtek 65.22 terhadap judul PNPS 2025.

Rekapitulasi Matriks Nilai Kepentingan Usulan Judul PNPS 2025 Komite Teknis 65-22/Bidang Pascapanen Pertanian Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian						
No.	Judul PNPS	Penilaian (√)				Skoring untuk mengisi
		Mendukung program pemerintah (pemenuhan gizi; ekspor/perdagangan)	Komoditas prioritas Kementan (mendukung swasembada; ketahanan pangan; peningkatan ekonomi petani)	Mengikuti perkembangan IPTEK serta inovasi	Nilai (tgl 10/09/24) n = 8	
1	Metode deteksi infestasi kutu beras	22	24	18	64 (3)	1. Tidak setuju 2. Biasa 3. Sangat setuju
2	Proses jagung: berasan	21	22	19	62	
3	Penanganan bunga krisan potong	20	16	14	50	
4	Pengeringan cabai	23	23	16	62	
5	Penanganan pascapanen pala	22	23	16	61	
6	Proses pascapanen lada	23	23	20	66 (1)	
7	Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada hasil pertanian siap edar	23	22	20	65 (2)	
Catatan						
• Skoring/penilaian dalam satu judul PNPS bisa lebih dari satu • Komtek 65-22 penilai = 1. Prima Luna, PHD 2. Miskiyah, MP 3. Inneke SM, MSI 4. Indri Indrawan, MSI 5. Sigit Ismaryanto, SE 6. Dyah Ayu IN, SP 7. Dr. Hendra Wijaya 8. Wiji Astuti, SSI						

Gambar 5. Rekapitulasi matriks nilai kepentingan oleh Komtek 65.22 terhadap judul PNPS 2025

3.1.2. Produk Instrumen Pascapanen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Salah satu produk RSNI yang telah dihasilkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian adalah RSNI No 3389:2023 yaitu rancangan SNI lombok kering yang merupakan revisi dari SNI yang telah ada sebelumnya (SNI 01-3389-1994).

Cabai merupakan komoditas hortikultura di Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Cabai digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga dapat digunakan untuk keperluan industri diantaranya, industri bumbu masakan dan industri makanan.

Ketersediaan dan kebutuhan cabai merah di masyarakat sangat tidak stabil. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca, bencana, hama, dan sebagainya. Keadaan demikian merupakan permasalahan pertanian yang sering dihadapi di masyarakat. Pada saat produksi meningkat, harga cabai merah relatif rendah. Pada saat produksi cabai merah menurun, harga cabai merah akan meningkat karena terjadi kelangkaan komoditas.

Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan cabai merah adalah dengan cara dikeringkan. Untuk menjaga kualitas cabai yang sudah dikeringkan (Cabai Kering) ini, pada tanggal 29 Desember 2023 Badan Standardisasi Nasional sudah menetapkan SNI 3389:2023 untuk Standar Mutu Cabai Kering.

3.1.3. Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan

Pendampingan penerapan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian merupakan suatu upaya untuk membina dan mengawal penerapan standar instrumen pascapanen pertanian (SNI/PTM/standar mutu lain) untuk meningkatkan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing untuk kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Diseminasi standar instrumen pascapanen pertanian merupakan upaya untuk penyebaran informasi terkait SNI produk maupun teknologi pascapanen pertanian yang bertujuan untuk menginformasikan, meningkatkan pengetahuan, menggugah minat, dan meningkatkan keterampilan pengguna terhadap standar instrumen pascapanen pertanian. BBPSI Pascapanen Pertanian secara aktif melakukan diseminasi terkait penyebaran informasi dan penerapan standar instrumen pascapanen pertanian bagi pelaku usaha, UMKM, siswa, mahasiswa, dan stakeholder lain. Diseminasi SNI yang dihasilkan telah dilakukan sosialisasi secara online kepada stakeholder dan petani serta BSIP Penerapan seluruh Indonesia.

3.1.4. Lembaga Penerap Standar yang didampingi

Penyidikan dan Pengujian Produk

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 adalah Rp 43.536.682,00 dan realisasi fisik 76%, dengan perkembangan kegiatan pengelolaan dan pengembangan laboratorium sebagai berikut:

- Penerbitan Lembar Hasil Pengujian (LHU) Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian

Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian merupakan laboratorium kompeten yang terdaftar sebagai laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP 366 IDN dan sebagai laboratorium PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) ISO 17043:2010 dengan nomor PUP-024-IDN. Pada tanggal 26 September tahun 2024, Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah menerbitkan 93 Lembar Hasil Pengujian (LHU).

- Kaji Ulang Dokumen LPK

Kaji ulang dokumen perlu diselenggarakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan dan memutakhirkan dokumen LPK. Kaji Ulang Dokumen LPK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun seperti yang tertuang dalam Panduan Mutu PM 8.3 tentang pengendalian dokumen sistem manajemen. Metode Kaji Ulang Dokumen adalah mengkaji langsung dokumen ISO disesuaikan dengan ketentuan ISO terkait dan keterbaruan sesuai dengan perkembangan terakhir di LPK BBPSI Pascapanen. Dokumen ISO yang dimaksud meliputi Panduan Mutu (PM), Prosedur Kerja (PK), Instruksi Kerja (IK), serta formulir dan lampiran. Proses pengkajian dokumen LPK dilaksanakan pada tanggal 6 Juli – 16 Agustus 2024. Hasil KUD direkap oleh PenjabSistem Mutu LPK, dan akan disampaikan ke tim LPK BBPSI Pascapanen.

- Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Kegiatan PUP pada bulan Agustus 2024 adalah tahapan pelaksanaan uji profisiensi dan pengumpulan data hasil analisa objek UP yang telah dilakukan oleh peserta. Pada tahapan pelaksanaan uji profisiensi ini para peserta melakukan pengujian terhadap objek UP yang telah didistribusikan dengan paramater pengujian, yaitu kadar air, kadar beras kepala, kadar beras patah, kadar amilosa dan derajat sosoh. Objek UP

dianalisis menggunakan metode uji rutin yang biasa digunakan di laboratorium peserta. Metode uji yang digunakan adalah sesuai dengan SNI 6128:2020 (butir 7.7) untuk analisis beras kepala dan beras patah, SNI 6128:2020(butir 7.6) untuk analisis kadar air beras, SNI 6128:2020 (butir 7.11) untuk analisis kadar amilosa dan SNI 6128:2020 (butir 7.5) untuk analisis derajat sosoh. Setelah pelaksanaan uji profisiensi, peserta UP mengumpulkan data hasil analisa objek UP menggunakan formulir yang telah disiapkan yaitu F.PUP.03 dan peserta wajib mencantumkan nilai estimasi ketidakpastian pengukuran.



Gambar 40. Sertifikat Akreditasi PUP

- Berdasarkan hasil Re-akreditasi, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memutuskan untuk memberikan re-akreditasi kepada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi dan menerapkan secara konsisten SNI ISO IEC 17043:2023 dengan nomor akreditasi PUP-024-IDN sesuai ruang lingkup dengan masa berlaku hingga 17 Desember 2029.
- Penandatanganan Lisensi dengan PT. KAS
Menindaklanjuti permohonan dari Karya Adyatma Sejahtera (PT.KAS) terkait perpanjangan Lisensi atas paten:
 - komposisi dan proses pembuatan bahan pengkompatibel (*compatibilizer*) untuk produksi kompon karet yang berpengisi (*filler*) nano-biosilika dari sekampadi
 - proses ekstraksi serbuk amorf nanosilika dari abu sekam padi menggunakan teknik hidrotermal cepat
 - komposisi dan proses pembuatan kompon karet berpori menggunakan bahan pengisi biosilika, minyak nabati, dan *compatibilizer*.



Gambar 41. Penandatanganan Lisensi dengan PT KAS

- Rintisan Kerjasama Lisensi dengan PT. Solutech Multi Sentosa (PT.SMS)
PT. Solutech Multi Sentosa bergerak di bidang alat kesehatan, healthcare serta memenuhi kebutuhan klinik dan rumah sakit. PT. Solutech Multi Sentosa juga sudah memiliki izin untuk produksi makanan dan merek yang dipatenkan adalah gizimu. Saat ini PT. SMS menggunakan sistem maklon untuk produksi makanan, sehingga PT.SMS berniat untuk mengembangkan sendiri produknya dengan melisensi teknologi yang telah dikembangkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian dengan judul paten: 1) Proses Pembuatan Kacang Hijau Instan dan 2) Formula dan Produksi Nasi Instan Fortifikasi Mineral Zn dan Fe serta 3) Sup Instan. Berdasarkan hasil rapat, BBPSI Pascapanen siap untuk membantu percepatan izinedar PT. SMS dengan sementara memakai laboratorium di BBPSI Pascapanen Pertanian.
- Pemaparan hasil Kaji Ulang Dokumen LPK
Ringkasan Hasil Kaji Ulang Dokumen LPK klausul integrasi (4, 5, 6, dan 8) disampaikan oleh penjab sistem mutu LPK BBPSI Pascapanen Pertanian. Sedangkan klausul 7 disampaikan oleh sub penjab mutu setiap ISO, yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan SNI ISO/IEC 17065:2012.
- Verifikasi lisensi nasi instan fortifikasi, kacang hijau instan, dan sop instan
PT. Solutech Multi Sentosa (PT.SMS) mengajukan permohonan lisensi dengan judul paten: 1) Proses Pembuatan Kacang Hijau Instan, 2) Formula dan Produksi Nasi Instan Fortifikasi Mineral Zn dan Fe dan 3) Sup Instan. Saat ini PT.SMS sudah memiliki merek yang dipatenkan yaitu gizimu dan sudah mendapatkan izin untuk produksi makanan dari BPOM. BBPSI Pascapanen Pertanian siap untuk membantu PT.SMS dalam

percepatan izin edar. Karena BBPSI Pascapanen Pertanian sudah memiliki line process untuk produksi, maka untuk sementara memakai laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian. Beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain: dibuat inventaris line processnya, kondisi dan kapasitas alat, posisi alat ada di laboratorium mana, dimensi alat beserta kelengkapan personil. Perlu juga disusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang nantinya akan disampaikan ke PT SMS.

- Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Kegiatan yang sudah terlaksana adalah mengirimkan konfirmasi data ke semua peserta dan pemberian kode lab sebagai upaya menjaga kerahasiaan. PUP BBPSI Pascapanen Pertanian memberikan jangka waktu 1 hari utk semua peserta mengkonfirmasi tabulasi data yg dilakukan oleh PUP sebelum pengolahan data. Dari 26 peserta, terdapat 18 peserta yang sudah mengirimkan konfirmasi dan untuk 8 peserta yang belum mengkonfirmasi.

- Pembahasan Kerjasama dengan Biotanah dan Biro KLN

Tujuan kunjungan Biro KLN ke BBPSI Pascapanen Pertanian terkait tindaklanjut TCP yang telah ditandatangani oleh Biotanah dan BBPSI Pascapanen Pertanian. Biro KLN juga mengkonfirmasi kepada Biotanah, apakah kerjasama antara Biotanah dengan BBPSI Pascapanen Pertanian masih berada dibawah payung G to G dengan CIRAD, karena berdasarkan laporan yang disampaikan oleh CIRAD ke Biro KLN, tidak ada laporan kerjasama antara BSIP dengan Biotanah. Sehingga perlu dibuat laporan oleh CIRAD kepada Biro KLN terkait kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Biotanah dengan BSIP. BBPSI Pascapanen Pertanian diminta untuk menyampaikan nota dinas ke Sekretariat BSIP dengan tembusan ke Biro KLN terkait pemberitahuan penandatanganan TCP. Pelaksanaan kick off akan dikonsultasikan dengan BSIP, dengan mengundang Biro KLN dan Kedutaan Besar Perancis. Diskusi terkait keberangkatan ke Perancis dan pelaksanaan kick off akan dijadwalkan sekitar pertengahan Oktober, menunggu kedatangan Direktur Utama Biotanah, Franck Miraux ke Indonesia. Sampel hasil uji coba alat tersebut akan dianalisa di Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian.



Gambar 42. Pembahasan kerjasama dengan Biotanah dan Biro KLN

- Persiapan audit internal

Dalam rangka mempersiapkan audit internal dilaksanakan pertemuan yang dibuka oleh Kapoksi KLSI dan dihadiri oleh Pengelola LSPro, LPH, Lab Pengujian, dan PUP BBPSI Pascapanen Pertanian. Persiapan meliputi pembentukan tim auditor, penunjukan ketua auditor, mekanisme dan jadwal audit.



Gambar 43. Persiapan audit internal

- Sosialisasi audit internal

Telah dilaksanakan sosialisasi audit internal dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Mutu integrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (Laboratorium Uji), SNI ISO/IEC 17043:2023 (Penyelenggara Uji Profisiensi), dan SNI ISO/IEC 17065:2012 (Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Pemeriksa Halal) di LPK Balai Besar Pengujian Standar

Instrumen Pascapanen Pertanian. Agenda sosialisasi audit meliputi jadwal audit, penugasan auditor, dan mekanisme audit. Audit internal LPK BBPSI Pascapanen Pertanian akan dilakukan selama 4 Hari (1-2 dan 3-4 Oktober) oleh 16 auditor internal dengan ruang lingkup audit :

1. SNI ISO/IEC 17025 :2017 (lab pengujian)
 2. SNI ISO/IEC 17043 :2023 (lab PUP)
 3. SNI ISO/IWC 17065 :2012 (LSPro Dan LPH)
- Pelaksanaan audit halal LPH BBPSI Pascapanen Pertanian
- LPH BBPSI Pascapanen Pertanian hingga triwulan tiga 2024 ini telah melakukan audit untuk 1 pelaku usaha, yaitu:

Tabel 1. Pelaku usaha yang mengajukan audit halal

No.	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Ruang Lingkup	Tim audit
1	Air Isi Ulang Jasinga	Kp. Kalongsari Rt/Rw 003/007, Kalongsawah, Kec. Jasinga, Kab. Bogor	Minuman	Prima Luna, S.TP, M.SI., Ph.D dan Dr. Resa Setia Adiandri, S.TP, M.SI

Audit dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024, saat ini proses perbaikan laporan hasil audit sedang dikerjakan untuk selanjutnya dokumen akan diupload pada aplikasi sihalal.

3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan strategis di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya adalah realisasi keuangan yang masih rendah serta masih ada beberapa kegiatan dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi. Namun demikian, hal ini tidak menghambat capaian fisik kegiatan tersebut.

Dalam upaya pemecahan permasalahan diatas dilakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga capaian realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan dapat berjalan sinkron. Untuk mencapai hal ini diantaranya dengan melakukan penjadwalan kegiatan, manajemen pencairan anggaran untuk kegiatan, serta rencana aksi kegiatan untuk beberapa bulan ke depan.

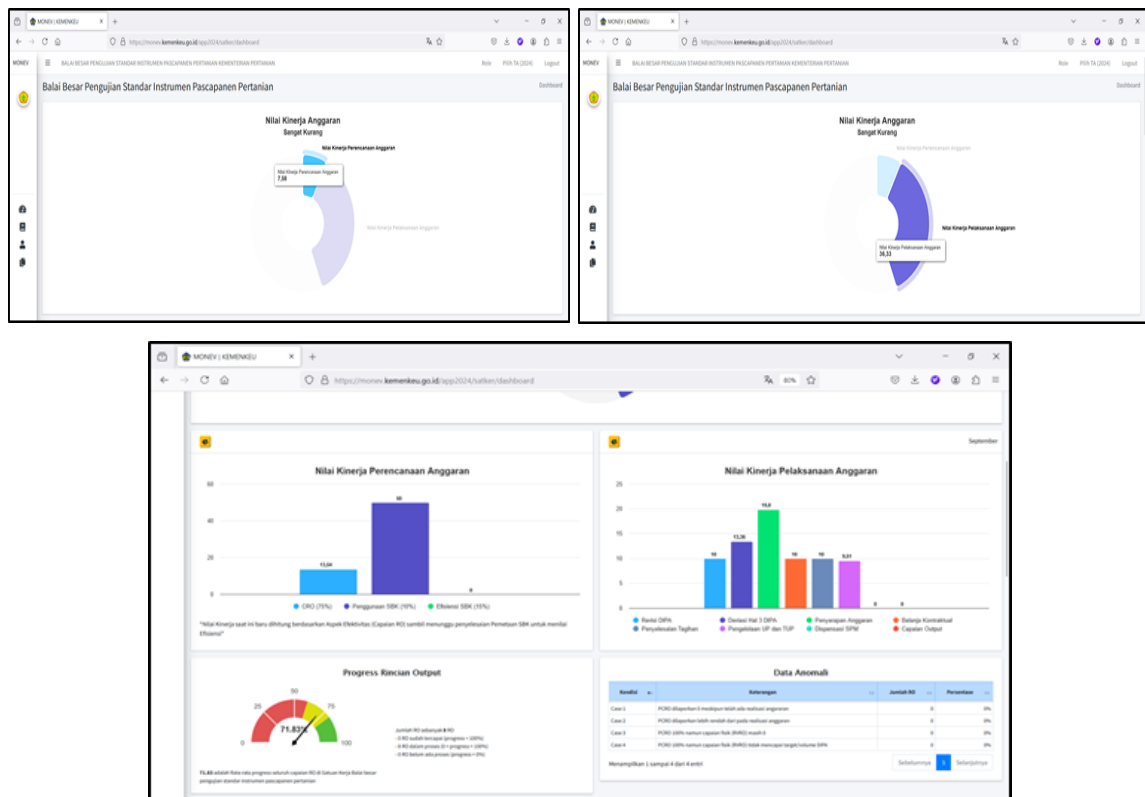
IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Evaluasi Aplikasi Monev Online

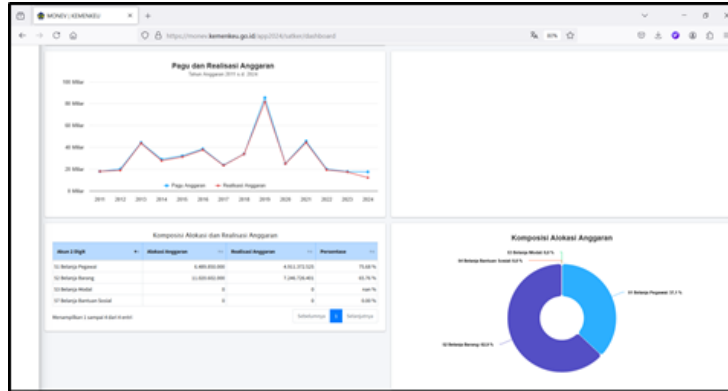
Terdapat 4 aplikasi monev online yang dilaporkan setiap bulan dari setiap satker di BSIP. Sampai dengan akhir triwulan tiga 2024 berikut perkembangan laporan aplikasi monev online untuk kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian:

4.1.1. Aplikasi SMART DJA

Sampai dengan akhir triwulan tiga 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 7,58% dan untuk Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 36,33%, dengan rincian: a) Revisi DIPA 10%, b) Deviasi Hal 3 DIPA 13,32%, c) Penyerapan Anggaran 19,8%, d) Belanja Kontraktual 10%, e) Penyelesaian Tagihan 10%, f) Pengelolaan UP dan TUP 9,51%, g) Dispensasi SPM 0%, dan Progress Rincian Ouput 71,83%.



Gambar 44. Dashboard Nilai Kinerja Anggaran pada Smart DJA

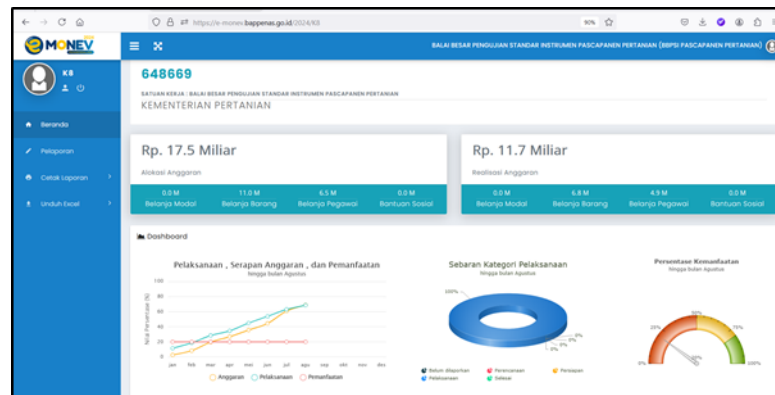


Gambar 45. Tabel komposisi alokasi dan realisasi anggaran pada aplikasi SMART-DJA

Berdasarkan aplikasi SMART-DJA, komposisi alokasi dan realisasi anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian sampai dengan akhir triwulan tiga 2024, persentase realisasi anggaran terhadap alokasinya per jenis belanja sebagai berikut: belanja pegawai Rp 4.911.372.525,00 (75,68%), belanja barang Rp 7.246.726.401,00 (65,76%), dan belanja modal (0%), dengan progress rincian output 71,83 %.

4.1.2. Aplikasi e-Monev Bappenas

Realisasi anggaran pada aplikasi e-monev Bappenas belum dapat diperbarui dikarenakan hingga akhir bulan September aplikasi e-Monev Bappenas sedang dalam proses internalisasi dan interkineksi dengan aplikasi.



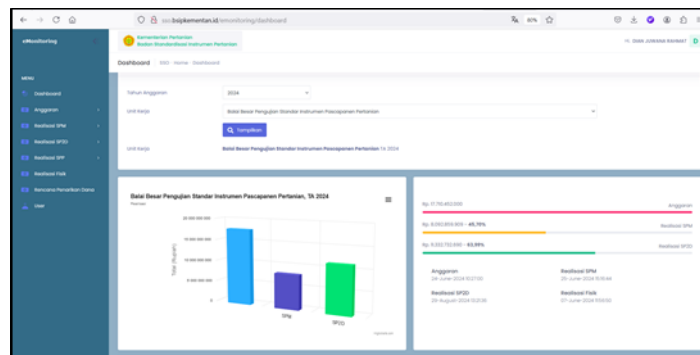
Gambar 46. Dashboard aplikasi e-monev Bappenas

Pada aplikasi e-monev Bappenas, di dashboard terlihat bahwa nilai persentase sebaran kategori pelaksanaan setiap kegiatan sebagian besar, a) Belum dilaporkan 0 %, b) Sudah dilaporkan 0 %, c) Belum dilaksanakan 0 %, d) Sudah dilaksanakan 0 %, e) Belum direvisi 0 %, f) Sudah direvisi 0 %.

b) Persiapan 0%, c) Perencanaan 0%, d) pelaksanaan 100%, e) Selesai 0%. Pelaksanaan dan serapan anggaran sampai akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp12.368.364.864,00 (68,39%) dari pagu anggaran Rp 17.710.452.000,00.

4.1.3. Aplikasi e-Monitoring BSIP

Pada aplikasi ini, realisasi anggaran BSIP Pascapanen Pertanian hingga akhir triwulan tiga 2024 BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan update realisasi keuangan dan fisik, serta perkembangan kegiatan hasil kegiatan sampai akhir triwulan ketiga 2024 dengan rincian realisasi SPM sebesar Rp 8.092.859.909,00 (45,70%), realisasi SP2D sebesar Rp 12.158.098.926,00 (69,43%).



Gambar 47. Dashboard aplikasi e-moneyv BSIP

4.1.4. Aplikasi e-SAKIP

Sampai dengan akhir triwulan tiga 2024, aplikasi e-sakip Kementan belum dapat diisi, karena masih dalam proses pembaharuan/pengembangan. Dalam aplikasi ini akan melaporkan capaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu PK level 2 (KaBB) dan level 3 (Kabag TU).

The screenshot shows the 'e-SAKIP KEMENTERIAN PERTANIAN' application. It displays a table titled 'REKAPITULASI PELAKSANAAN DOKUMEN SAKIP TA 2024' with columns for 'No', 'Indikator', 'Rencana Strategis', 'Perjanjian Kinerja', 'Rencana Alas', 'Laporan Kinerja', 'Pengukuran Kinerja', 'Realisasi Alas', 'Rencana Strategis', 'Perjanjian Kinerja', 'Rencana Alas', 'Laporan Kinerja', 'Pengukuran Kinerja', 'Realisasi Alas'. The table lists various indicators and their realization status, with a legend at the bottom indicating 'Pengukuran Kinerja Realisasi Kurang < 80%', 'Pengukuran Kinerja Realisasi Kurang < 80%', 'Pengukuran Kinerja Realisasi Kurang < 80%', and 'Pengukuran Kinerja Realisasi Kurang < 80%'.

Gambar 48. Tampilan aplikasi e-moneyv BSIP

4.1.5. Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan tiga 2024 sebesar Rp35.379.500,00 (55,28%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan: Telah diterbitkannya Perubahan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran TUP

DIPA Pagu Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024 yang terbit pada tanggal 24 Nopember 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.549.452.000,00. Selama TA. 2024, sampai dengan akhir triwulan tiga 2024, DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi POK pertama pada tanggal 5 Juni 2024. Revisi ke-dua pada tanggal 23 Januari 2024, dengan pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,00. Revisi ke-tiga pada tanggal 10 Februari 2024, merupakan revisi POK, dengan pagu anggaran tetap. Revisi ke-empat pada tanggal 15 Februari 2024, realokasi anggaran dengan pagu anggaran menjadi Rp17.510.452.000,00. Revisi ke-lima pada tanggal 4 April 2024, dengan pagu anggaran menjadi Rp17.610.452.000,00. Revisi ke-enam pada tanggal 22 April 2024 pergeseran akun dengan pagu anggaran tetap. Revisi ke-tujuh tanggal 29 Mei 2024 revisi halaman III DIPA dengan pagu anggaran tetap dan revisi ke-delapan buka blokir Program Teknis, PNPB dan penambahan anggaran pada sub-komponen monitoring program strategis Kementan dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.710.452.000. Revisi ke-sembilan pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan total pagu anggaran tetap. Revisi ke-sepuluh terkait realokasi belanja pegawai dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.649.542.000. Revisi ke-sebelas pada tanggal 19 September 2024 merupakan revisi POK dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.710.452.000, dengan pagu efektif Rp 16.934.739,00 dan pagu blokir Rp 575.713.000,00.

Belanja dalam rangka operasional kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komposisi pagu anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian disajikan pada Tabel 3. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp6.489.850.000,00 (38,2%), belanja barang Rp10.746.102.000,00 (58,6%), belanja PNPB Rp474.500.000,00 (3,2%). Pada Tabel 2 disajikan Realisasi anggaran (SP2D) sampai dengan akhir triwulan tiga 2024 yaitu sebesar

Rp. 12.368.634.864,00 (69,83%), dengan realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 4.923.493.914,00 (75,86%), belanja barang sebesar Rp 7.401.604.268,00 (68,84%), dan belanja PNPB sebesar Rp. 43.536.682 (9,17%).

Tabel 2. Realisasi anggaran TA. 2024 sampai dengan triwulan tiga 2024 berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d akhir triwulan ketiga tahun 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.489.850.000,00	4.923.493.914,00	75,86
Belanja barang	10.746.102.000,00	7.401.604.268,00	68,84
PNBP	474.500.000,00	43.536.682,00	9,17
Total	17.710.452.000,00	12.368.634.864,00	69,83

4.2. Evaluasi Kegiatan Manajemen

4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian): realisasi anggaran terhadap pagu non blokir dan pagu blokir kegiatan sampai dengan triwulan tiga 2024 adalah Rp32.999.000,00 (31,73%) dan realisasi fisik sekitar 70%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 10 pegawai
- 2) Pemrosesan kenaikan gaji berkala sebanyak 36 orang PNS
- 3) Pengusulan calon petugas belajar sebanyak 4 pegawai
- 4) Pengusulan pencantuman gelar PNS sebanyak 3 orang

4.2.2. Pengelolaan Aset

i. Layanan Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN)

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan tiga 2024 sebesar Rp24.945.500,00 (35,93%) dan realisasi fisik sekitar 65%.

Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan tiga 2024 Rp26.495.500,00 (39,05%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut

1. Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan meliputi urusan tata kelola surat menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas, pelayanan komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor
 2. Terlaksananya pelayanan perlengkapan meliputi:
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana/aset kantor Bogor dan Karawang
 - Kegiatan administrasi Barang Milik Negara: tutup periode 7 (Juli 2024) modul Aset aplikasi SAKTI, daftar akun user Analis, Koordinator, Supervisor aplikasi SIMAN V2.
- ii. Layanan Umum
- A. *Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal*: realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan tiga 2024 Rp36.905.500,00 (55,68%) dan realisasi fisik sekitar 77%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi Kegiatan ketatausahaan
 - a. Koordinasi persiapan penilaian PIPK dengan tim sekretariat BSIP dan internal BBPSI Pascapanen Pertanian
 - b. Melaksanakan ketatausahaan pengarsipan
 - c. Melaksanakan koordinasi penghapusan arsip negara dengan biro
 - d. Koordinasi persiapan tes P3K bagi personil BBPSI Pascapanen Pertanian
 - e. Penguatan pemahaman JF Litkayasa
 2. Koordinasi Kegiatan kelembagaan
 - a. Koordinasi kelembagaan dengan mengikuti rapim B di Sekretariat BSIP
 - b. Koordinasi persiapan HUT BSIP
 3. Kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan
 - a. Melaksanakan koordinasi LPK BBPSI Pascapanen Pertanian
 - b. Melaksanakan Pra-audit LsPro
 - c. Mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi halal BBPSI Pascapanen Pertanian
 - d. Koordinasi pemaparan hasil kaji ulang dokumen
 - e. Koordinasi tindaklanjut hasil Pra-audit
- B. *Layanan Informasi Publik*
- Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan tiga 2024 Rp47.801.500,00 (95,60%) dan realisasi fisik sekitar 97,60%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

a) Mengikuti penilaian Tahap II Pemeringkatan KIP

Hasil monitoring penilaian Tahap I yaitu penilaian melalui formular self assessment Questionnaire (SAQ) dan Website oleh tim verifikator, PPID BBPSI Pascapanen Pertanian memperoleh predikat Informatif dengan nilai :

Nilai SAQ : 95, Nilai Web : 89, serta Nilai tahap I : 93,8

Penilaian tahap II dilakukan secara online melalui zoom pada tanggal 5 September 2024. Aspek penilaian meliputi:

- a. Pemahaman tentang keterbukaan informasi public
- b. Pemahaman tentang klasifikasi informasi public sesuai UU 14/2008
- c. Opini tentang permohonan informasi pengadaan barang dan jasa
- d. Strategi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public
- e. Dukungan anggaran dan pengelolaan dan pelayanan informasi public
- f. Keterbukaan informasi public dalam 3 program kementan (PAT, Pompanisani dan Oplah
- g. Kolaborasi yang sudah dilakukan dalam keterbukaan informasi public
- h. Inovasi yang mendukung implementasui KIP



Gambar 6. Penilaian Tahap II Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2024

b) Penilaian pelaksanaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2024.

BBPSI Pascapanen Pertanian ditetapkan menjadi lokus evaluasi untuk dinilai kepatuhan penyelenggara pelayanan public. Penilaian dilaksanakan tanggal 11-12

September 2024. Penilaian dilakukan oleh evaluator dari Ombudsman RI. Teknik penilaian :

1. Melihat sarana prasaranan
2. Melihat dokumen
3. Wawancara pelaksana pelayanan
 - a. Pimpinan layanan/pelayanan (setara eselon II): Dr. Asmarhansyah
 - b. Staf layanan/pelayanan: Erwan Gustian Apriyansyah, S.Sos
 - c. Pimpinan pengelola pengaduan: Prima Luna, P.hD
 - d. Staf pengelola pengaduan : Afdan Irfandy, A.Md



Gambar 50. Penilaian pelaksanaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN PERIODE JULI s/d SEPTEMBER 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN
TAHUN 2024

Tabel 3. Daftar permohonan informasi publik

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaman Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
1	2 Juli 2024	Nama Pemohon	Jyoscie Dwi Arma Agustina	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Profil BBPSI Pascapanen Pertanian	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
2	2 Juli 2024	Nama Pemohon	Julia Anggrain	Email	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Profil BBPSI Pascapanen Pertanian	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
3	2 Juli 2024	Nama Pemohon	Zahra	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Profil BBPSI Pascapanen Pertanian	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Wirausaha				Status	Selesai
4	2 Juli 2024	Nama Pemohon	Yesika Apriyeni	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Profil BBPSI Pascapanen Pertanian	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
5	2 Juli 2024	Nama Pemohon	Sepsi Nurlela	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Profil BSIP Pascapanen	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan

		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
6	12 Juli 2024	Nama Pemohon	Agus Arif	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Informasi Narasumber	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>51		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
7	18 Juli 2024	Nama Pemohon	Isti Ayu Fadhilah	Email	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Prosedur Analisa Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21 - 30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
8	19 Juli 2024	Nama Pemohon	Sutarman	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi Tepung Mokaf	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>51		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Wirausaha				Status	Selesai
9	1 Agustus 2024	Nama Pemohon	Yasakha	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Pegawai Swasta				Status	Selesai
10	5 Agustus 2024	Nama Pemohon	M. Raul	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	51-60		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Pegawai Swasta				Status	Selesai

11	5 Agustus 2024	Nama Pemohon	Yana	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Magang/PKL	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
12	8 Agustus 2024	Nama Pemohon	Nur Rahayu	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Pegawai Swasta				Status	Selesai
13	8 Agustus 2024	Nama Pemohon	laily	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Lab	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
14	9 Agustus 2024	Nama Pemohon	Iman Santoso	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Layanan Lab	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Wiraswasta				Status	Selesai
15	21 Agustus 2024	Nama Pemohon	Larissa	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Lab	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
16	21 Agustus 2024	Nama Pemohon	Sista Naely	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Magang/PKL	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan

		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
17	9 September 2024	Nama Pemohon	Vio Resita	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
18	10 September 2024	Nama Pemohon	Sri Ayu	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	PNS				Status	Selesai
19	11 September 2024	Nama Pemohon	Anggraeni Yustina	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Pendampingan	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	PNS				Status	Selesai
20	17 September 2024	Nama Pemohon	Nurul Faridah	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Pegawai Swasta				Status	Selesai
21	18 September 2024	Nama Pemohon	Friska Hanakin	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Pegawai Swasta				Status	Selesai
22	18 September 2024	Nama Pemohon	Wahyu Basando	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Lab	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan

		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
23	19 September 2024	Nama Pemohon	Runjai Wangsa	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Layanan Lab	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
24	23 September 2024	Nama Pemohon	Sri Hartati	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Layanan Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai

iii. Layanan Perkantoran

- a. Gaji dan Tunjangan: realisasi anggaran sampai dengan triwulan tiga 2024 sebesar Rp 4.923.493.914,00 (75,86%) dan realisasi fisik sekitar 82%, dengan perkembangan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan hingga bulan September 2024.
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor: realisasi anggaran sampai dengan triwulan tiga 2024 sebesar Rp6.096.236.424,00 (78,50%) dan realisasi fisik sekitar 80%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran dipergunakan untuk:

Pembayaran honor satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan hingga bulan September 2024. Pembelian ATK, bahan pendukung komputer, bahan kimia, konsumsi rapat, langganan surat kabar dan bahan pendukung lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan September 2024 kegiatan fisik perkantoran di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras Karawang, melaksanakan *medical check up*.
 - 2) Langganan daya dan jasa dipergunakan untuk Kegiatan pembayaran langganan daya dan jasa telah dilaksanakan yaitu untuk langganan Listrik PLN, langganan telepon, langganan air PDAM dan gas hingga bulan September 2024 yang mencakup kantor Bogor dan Laboratorium Karawang.
 - 3) Pemeliharaan perkantoran dipergunakan untuk:
 - Pembayaran pemeliharaan gedung kantor Bogor dan Karawang
 - Perawatan instalasi air
 - Perawatan AC
 - Perawatan kendaraan roda 2 dan 4 Bogor dan karawang
 - Perawatan sarana pengujian
 - Pemeliharaan Jaringan
 - 4) Pembayaran terkait operasional kantor dipergunakan untuk:
 - Pembelian penguat daya tahan tubuh bagi personil laboratorium
 - Pelaksanaan MCU dengan Prodia
 - Pembayaran honor Satuan Kerja hingga bulan September 2024
 - Pembayaran pakaian dinas lapangan pegawai

iv. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp 152.255.255 (38,55%) dan realisasi fisik sekitar 80%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp 53.200.150,00 (33,25%) dan realisasi fisik sekitar 90,45%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1. Tersusunnya perencanaan program dan anggaran pascapanen pertanian sesuai kebutuhan pengguna yang mendukung kebijakan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan program strategis Kementerian Pertanian
2. Terlaksananya perencanaan program dan anggaran kegiatan BBPSI
Usulan Rancangan Awal (Ranwal) pagu anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2025 Rp20.107.666.000,00
 - Program teknis Rp2.795.000.000,00
 - Program dukman Rp17.312.666.000,00

➤ **Pagu Anggaran 2025**

Usulan pagu anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2025
Rp15.918.328.000,00

- Program teknis Rp616.756.000.000,00
- Program dukman Rp15.301.572.000,00

➤ **Pagu Alokasi Anggaran 2025**

Usulan pagu alokasi anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2025
Rp15.718.328.000,00

- Program teknis Rp616.756.000.000,00
- Program dukman Rp15.101.572.000,00

- 2) Koordinasi Institusional realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 sebesar Rp99.989.105.000,00 (61,34%) dan realisasi fisik sekitar 70%, dengan perkembangan kegiatan Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Provinsi Sulawesi Barat.

v. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

a. Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi

Realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan triwulan ketiga 2024 sebesar Rp46.782.800,00 (62,38%) dan realisasi fisik sekitar 73%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut: hingga bulan September 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan penyusunan laporan rutin yang merupakan tugas dan fungsi terkait evaluasi dan pelaporan yaitu (1) laporan perkembangan kegiatan Balai hingga bulan September, (2) laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat hingga bulan September, (3) laporan Pengelola Gratifikasi hingga bulan September, (4) laporan pengelolaan penanganan benturan kepentingan hingga bulan September, (5) Tersusun laporan bulanan kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian hingga bulan September, (6) laporan Matrik realisasi KRO-RO kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian hingga bulan September, (7) laporan SPI bulan hingga September, (8) update data aplikasi e-monev hingga bulan September, (9) penyusunan renaksi, (10) penyusunan manajemen risiko indeks, (11) Pembahasan kegiatan dukungan ketahanan pangan tahun 2020-2024.



Gambar 7. Pelaksanaan evaluasi silang kegiatan tengah tahun/monev on-going

b. Monitoring Program Strategis Kementan

Realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan triwulan ketiga 2024 sebesar Rp198.127.996 (99,06%) dan realisasi fisik sekitar 99%, dengan perkembangan kegiatan koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Provinsi Sulawesi Barat.

4.3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan beberapa kegiatan mengacu kepada pelaksanaan kegiatan di BSIP dan kegiatan baru berjalan setelah pembukaan blokir anggaran serta beberapa kegiatan yang masih dalam penyelesaian pertanggungjawaban administrasi SPJ.
- Untuk kegiatan pemeliharaan kantor, pelaksanaan pengecatan gedung kantor terkendala cuaca dengan curah hujan tinggi.

Beberapa rekomendasi sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan diatas diantaranya:

- Percepatan kegiatan internal sehingga penyerapan anggaran juga dapat berjalan cepat,
- Melakukan penjadwalan kegiatan serta rencana aksi kegiatan untuk beberapa bulan ke depan.

Adapun beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi tersebut diatas diantaranya:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan
- Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1. Evaluasi Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan, baik kegiatan teknis maupun dukungan manajemen, selama tiga bulan sebelumnya (April-Juni 2024) diperoleh hasil bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan kegiatan pada semua bagian dan layanan yang tersedia di Balai Besar Pengujian Standard Instrumen Pascapanen Pertanian dapat berjalan efektif dan relevan.

5.2. Kesimpulan

1. Pada Perjanjian Kinerja TA.2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 telah dihasilkan dua RSNI 3, yaitu RSNI Daun Rajangan Talas Beneng dan RSNI Bawang Merah untuk Konsumsi.
2. Sasaran kedua, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai). Sasaran ketiga, "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai). Permasalahan utama dalam pencapaian target kegiatan adalah adanya blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan agak terhambat. Ke depan diharapkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaannya dan bisa mencapai targetnya. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi

hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ke depannya.

3. Total Anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.710.452.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp 17.710.452.000,00 dan PNPB sebesar Rp474.500.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp 6.489.850.000,00 (2) Belanja Barang Rp 10.746.102.000,00 Realisasi anggaran berdasarkan pagu efektif per 30 September 2024 sebesar Rp 10.857.280.599,00 (61,30%), merupakan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 4.923.493.914,00 (75,86%) dan Belanja Barang Rp 7.401.604.268,00 (68,84%), dan belanja PNPB sebesar Rp 43.536.682,00 (9,17%).

5.3. Saran dan Penutup

Dengan disusunnya Laporan Triwulan ini, diharapkan adanya evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kinerja BPBSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 serta untuk periode selanjutnya. Laporan Triwulan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian.